

**KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP Keadilan  
Distribusi Kekayaan dalam Islam**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)**



**OLEH :**

**AHMAD HUSIN**  
**NIM:10625003848**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan Dalam Islam**. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dalam distribusi kekayaan, dan untuk mengetahui bagaimana campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu meneliti bahan-bahan yang ada di perpustakaan baik berupa buku, artikel, majalah, pidato tertulis dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer diambil dari buku Yusuf Qardhawi yang berjudul Norma dan Etika Ekonomi Islam dan karangan M.Faruq An-Nabhan dengan judul Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis. Sedangkan data skunder yakni literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas seperti buku yang berjudul Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab karangan Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang karangan Afzalurrahman dan lain-lain.

Setelah penelitian dilakukan maka dapat diketahui bahwa konsep Islam dalam distribusi kekayaan terbagi kepada dua macam. Pertama distribusi kekayaan melalui metode ekonomi (*komersil*) diantaranya, distribusi dengan metode perburuhan yaitu dengan pemberian upah, distribusi melalui kerjasama usaha (musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan lain-lain). Kedua distribusi kekayaan melalui non ekonomi (*non komersil*), diantaranya zakat, warisan, wakaf, jizyah dan kharaj.

Kemudian campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan mutlak dibutuhkan karena sistem pasar tidak bisa menjamin untuk tercapainya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak hanya cukup mengontrol distribusi kekayaan tetapi negara boleh memaksa orang-orang yang menumpuk kekayaan untuk menginvestasikannya dan yang tidak boleh luput dari

tanggung jawab pemerintah adalah memaksa orang kaya untuk mengeluarkan zakat karena zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan terhadap orang-orang yang tidak mampu.

## DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....   |     |
| PENGESAHAN .....   | i   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                                    | ii  |
| ABSTRAK .....  | iii |
| KATA PENGANTAR .....   | v   |
| DAFTAR ISI.....  | vii |
| BAB I     PENDAHULUAN  |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                 | 1   |
| B. Permasalahan.....   | 6   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                        | 6   |
| D. Metode Penelitian.....                                      | 7   |
| E. Sistematika Penulisan .....                                 | 8   |
| BAB II     GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA                        |     |
| A. Pengertian .....  | 10  |
| B. Syarat-Syarat Berdirinya Negara .....                       | 11  |
| C. Visi dan Misi Negara .....                                  | 13  |
| D. Tugas-Tugas Negara .....                                    | 14  |
| BAB III     TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN      |     |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum .....                            | 21  |
| B. Kriteria yang Mendukung Terwujudnya Distribusi Kekayaan ... | 24  |

|        |  |    |
|--------|--|----|
|        | C. Sendi Kebebasan dan Keadilan dalam Distribusi Kekayaan .....                    | 25 |
|        | D. Tujuan Distribusi Kekayaan .....  | 37 |
| BAB IV | KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP KEADILAN<br>DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM             |    |
|        | A. Konsep Islam dalam Distribusi Kekayaan .....                                    | 39 |
|        | B. Campur Tangan Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan<br>Dalam Islam ..... | 53 |
| BAB V  | KESIMPULAN DAN SARAN   |    |
|        | A. Kesimpulan .....  | 64 |
|        | B. Saran.....  | 65 |
|        | DAFTAR PUSTAKA.....  | 66 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Muamalah merupakan salah satu bagian utama dalam Islam, di mana muamalah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat berbagi dengan cara saling berdistribusi antara satu dengan lainnya. Fenomena tingkat kemiskinan yang semakin menyolok dalam realitas kehidupan sekarang ini baik antar individu, kelompok, masyarakat atau antar negara akibat adanya ketidakadilan dalam sistem distribusi. Akibat ketidakadilan sistem distribusi menimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonisan hidup manusia, kurang bergeraknya potensi ekonomi serta timbulnya masalah kriminal.

Dewasa ini kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin semakin melebar, jurang pemisah antara keduanya sangat luas. Ditambah lagi kemiskinan pada saat ini menunjukkan peningkatan. Kedua hal ini merupakan masalah besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Sebagai akibat dari kesenjangan sosial tersebut muncullah berbagai masalah lainnya. Seperti, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya prostitusi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan alasan tuntutan ekonomi yang semakin meningkat sedangkan pendapatan yang dimiliki kurang atau bahkan tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak kepada kehidupan politik dan sosial suatu negara secara negatif.

Dalam ekonomi kapitalis setiap orang diberi kebebasan secara mutlak dalam kepemilikan pribadi. Karena itu sistem kapitalis perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi setelah menghasilkan barang dan jasa dalam suatu aktivitas produksi.

Oleh karena itu mereka mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah yang tidak seimbang agar terjadi efisiensi untuk memperoleh laba yang maksimum serta menguasai modal untuk monopoli. Sistem kapitalis memiliki watak monopoli secara luas, mereka tidak tunduk pada negara, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan negara dengan berbagai cara meskipun merugikan masyarakat banyak. Tidak seorang pun bisa membatasi jenis, jumlah produksi dan laba yang diperolehnya. Pada akhirnya merekalah yang berhak menentukan jumlah produksi dan besarnya keuntungan serta manajemen distribusi<sup>1</sup>.

Berbeda dengan paham ekonomi sosialis, produksi tunduk pada peraturan negara. Seluruh sumber produksi adalah milik negara, termasuk distribusi barang dan jasa harus diputuskan melalui kebijakan negara. Negaralah yang menyusun strategi produksi rakyat, juga menentukan garis-garis besar distribusi, upah, gaji, bunga, laba dan para pegawai atau pekerja diatur sepenuhnya oleh pemerintah<sup>2</sup>.

Ekonomi Islam berbeda dengan kedua paham diatas, distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. ke- 4, h. 202.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 201

Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah syariah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, termasuk kaidah distribusi setelah meninggal dunia dalam bentuk warisan, hibah dan wasiat.

Ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, melalui unsur-unsur produksi antara individu masyarakat dan kelompoknya. Di samping adanya pengembalian distribusi dalam jaminan sosial melalui zakat, infaq, sadaqah atau wakaf. Para ekonom menjelaskan bahwa problematika ekonomi yang paling menonjol dari dulu sampai sekarang adalah adanya pemusatan kekayaan pada segelintir orang atau negara tertentu.

Sehingga Allah SWT mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi kekayaan ini supaya harta kekayaan itu tidak berpusat pada orang-orang yang mempunyai modal yang cukup, sebagaimana FirmanNya dalam surat al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.”*<sup>3</sup>.

Tetapi dalam kenyataannya kekayaan itu masih beredar diantara orang-orang kaya saja walaupun ayat al-Qur'an sudah menganjurkan supaya harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Kemudian pada sisi lain Islam membolehkan seseorang untuk kaya dan pada sisi yang lainnya dalam harta orang

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Syaamil Cipta Media, 2005), Cet. ke-2, h. 546.



kaya ada hak orang miskin<sup>4</sup>. Tetapi yang menjadi masalah kenapa harta itu masih berada di tangan orang-orang kaya saja?, kenapa masih banyak rakyat negara hidup dalam kemiskinan sementara disamping mereka ada yang hidup dalam keadaan serba berkecukupan bahkan hidup dalam keadaan mewah?. Kenapa kekayaan itu tidak terdistribusi kepada mereka?. Padahal sudah ada ayat al-Qur'an yang memberikan pedoman terhadap masalah ini.

Kemudian dalam ajaran Islam negara bertanggungjawab terhadap kemaslahatan rakyatnya. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya<sup>5</sup>.

Sehingga dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pendistribusian kekayaan, yang wajib diprioritaskan adalah kemaslahatan kaum muslimin secara umum, misalnya memberikan kepada kalangan yang dengan pemberian tersebut akan bermanfaat bagi umat Islam<sup>6</sup>.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa seorang penguasa (pemerintah) tidak diperkenankan memberikan kekayaan negara kepada seseorang hanya didasarkan pada dorongan nafsunya belaka. Misalnya menyalurkannya kepada sanak keluarganya ataupun kepada selainnya atas unsur cinta kasih dan

---

<sup>4</sup> Seperti dalam surat adz-Zariyat ayat 19, yang berbunyi *وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيْعِهِمْ الْبَيْعَةِ* “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h, 255.

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Alih Bahasa Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2007), Cet. ke-2, h. 311.

sejenisnya, dengan demikian sudah pasti tidak diperkenankan memberikan harta kekayaan negara kepada hal-hal yang haram<sup>7</sup>.

Pendapatan negara harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan petunjuk Allah dan RasulNya. Pengeluaran pemerintah harus dilaksanakan sesuai skala prioritasnya<sup>8</sup>. Afzalurrahman berpendapat untuk tercapainya distribusi kekayaan yang adil dan merata supaya harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, maka Islam menekankan pentingnya pendidikan dan latihan moral, disamping adanya aturan hukum yang legal. Tetapi apabila tetap terjadi pengumpulan kekayaan di antara orang tertentu maka negara (pemerintah) mempunyai hak dan wewenang untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat<sup>9</sup>. Walaupun pada dasarnya campur tangan negara haram dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh M.Faruq An-Nabahan<sup>10</sup>.

Namun demikian pengertian adil dan merata dalam Islam bukan berarti supaya setiap orang berpenghasilan sama, tetapi yang diinginkan Islam adalah kesamaan kesempatan dalam meraih kekayaan tanpa memandang kepada status

---

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah as-Syar'iyah*, Alih Bahasa Rofiq Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), Cet. ke-2, h. 49.

<sup>8</sup> Karnaen A.Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Cicero Publisng, 2008), Cet. ke- 1, h.158.

<sup>9</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,1997), Cet. ke-1 h. 142-144.

<sup>10</sup> Beliau berpendapat campur tangan pemerintah haram dilakukan kecuali dengan beberapa syarat yaitu, *pertama* bertujuan merealisasikan program syariah, *kedua* menjaga kesejahteraan masyarakat dan *ketiga* membentengi dasar-dasar moral. Lih. Dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. ke-2, h. 121-127.

sosial<sup>11</sup>. Inilah sebenarnya permulaan supaya keadilan distribusi kekayaan dapat tercapai.

Senada dengan pendapat di atas Yusuf Qardhawi juga mengemukakan untuk tercapainya distribusi kekayaan yang merata harus ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur kebebasan dan unsur keadilan<sup>12</sup>.

Tetapi kenapa pada umumnya negara mayoritas Islam yang sedang berkembang masih tetap miskin?. Padahal kekayaan negara mayoritas Islam pada umumnya sangat berlimpah, seperti Indonesia, Iraq, Iran, dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan?. Supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk negara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul:

**“KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP KEADILAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM”.**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan.

---

<sup>11</sup> Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 143.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 203.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dalam distribusi kekayaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan dalam Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan dalam Islam.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan bahan-bahan berupa buku-buku dan bahan yang tertulis lainnya yang ada di perpustakaan.

### **2. Sumber Data**

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data primer yaitu buku karangan M.Faruq an-Nabhan yang berjudul “Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis”, dan karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul “Norma dan Etika Ekonomi Islam”. Penulis memilih kedua buku ini karena sepengetahuan penulis kedua buku sangat banyak menyoroti tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi

kekayaan dalam Islam. Data sekunder yakni literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas seperti buku yang berjudul “Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab” karangan Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang karangan Afzalurrahman dan lain-lain.

### **3. Analisis Data**

Setelah-data-data diperoleh, selanjutnya penulis menganalisa data dengan metode *content analysis*. Yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dan kemudian memberikan interpretasi terhadap isi informasi tersebut.

### **4. Teknik Penulisan**

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan keterangan-keterangan atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Membahas gambaran umum tentang negara, meliputi pengertian negara, syarat-syarat berdirinya negara, visi dan misi negara dan tugas-tugas negara.

**BAB III** : Tinjauan teoritis distribusi kekayaan yang meliputi pengertian distribusi dan dasar hukumnya, kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi kekayaan, sendi kebebasan dan keadilan dalam distribusi, serta tujuan distribusi kekayaan.

**BAB IV** : Merupakan bab inti menyoroti tentang kontribusi negara terhadap distribusi kekayaan dalam Islam, yang terdiri dari konsep Islam dalam distribusi kekayaan, dan campur tangan negara terhadap keadilan distribusi dalam Islam.

**BAB V** : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA

#### A. Pengertian

Secara etimologi dalam bahasa Arab negara diartikan dengan *daulat* yang berasal dari kata *dala-yadulu-daulah* yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Sedangkan menurut terminologi adalah kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka<sup>1</sup>.

Menurut pendapat Aristoteles sebagaimana yang dikutip oleh Ni'matul Huda negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara<sup>2</sup>.

Negara menurut Roger F. Soultan sebagaimana yang dikutip oleh Dwi Winarno adalah alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat<sup>3</sup>.

Sedangkan menurut Nursiam Budiarjo dalam buku Dwi Winarno, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warganya supaya taat kepada perundangan

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichitar Baru van Hoeve, 2001), Cet. ke-2, h. 262.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010),Cet.ke-1, h. 8.

<sup>3</sup> Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet.ke-2 h. 35.

melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah<sup>4</sup>. Menurut Deliar Noer yang dikutip oleh Abdul Qodir Djaelani negara adalah semacam bentuk ikatan antarmanusia atau semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat menggunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya<sup>5</sup>.

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara didefinisikan dengan organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat<sup>6</sup>.

Dari beberapa defenisi di atas maka pengertian negara adalah sekelompok orang yang terorganisir menetap di wilayah tertentu yang mempunyai kedaulatan dan kebebasan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan menentukan tujuannya di bawah suatu pemerintahan.

## **B. Syarat-Syarat Berdirinya Negara**

Dalam buku yang berjudul Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an syarat berdirinya suatu negara harus ada beberapa unsur sebagai berikut<sup>7</sup>:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 36

<sup>5</sup> Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995), Cet.ke-1, h. 9.

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Cet.ke-3, h. 1069.

<sup>7</sup> Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet.ke-2, h. 96. Senada juga dengan pendapat Dwi Winarno bahwa syarat berdirinya suatu negara harus ada unsur yang empat sebagaimana telah disebutkan. Namun beliau berpendapat bahwa pengakuan dari negara lain bukanlah syarat mutlak, melainkan hanya syarat yang bersifat menyatakan (deklaratif). Lih. dalam bukunya yang berjudul *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet.ke-2, h. 36. Juga pendapat Hendra Nurtjahjo bahwa unsur primer berdirinya suatu negara adalah ada wilayah, ada rakyat dan ada pemerintahan yang berdaulat, sedangkan pengakuan negara lain hanyalah persyaratan skunder, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), Cet.ke-1, h. 32. Lih.juga Moh Kusnardi dan Bintang R.Saragih dalam bukunya *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), Cet.ke-2, h. 107-111.



1. Ada pemerintah
2. Ada penduduk
3. Ada wilayah
4. Ada pengakuan dari luar negeri.

Sedangkan menurut C.S.T.Kansil dan Christine Kansil syarat yang keempat untuk berdirinya suatu negara adalah harus mempunyai tujuan yang jelas<sup>8</sup>.

#### 1. Pemerintah

Pengertian pemerintah mencakup seluruh badan-badan negara, pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyat, sebab pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil<sup>9</sup>.

#### 2. Penduduk (rakyat)

Yang dimaksud dengan rakyat adalah sekumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berlainan. Syarat yang terpenting dalam hal ini adalah mereka harus terorganisasi dengan baik<sup>10</sup>.

#### 3. Wilayah

Wilayah adalah batas dimana kekuasaan negara itu berlaku, dengan demikian kekuasaan suatu negara tidak berlaku di luar batas wilayahnya, karena

---

<sup>8</sup> C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 2007), Cet. Ke-3, h. 148.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *op.cit.*, h. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.18

kalau kekuasaan itu terjadi di luar batas wilayahnya maka akan menimbulkan sengketa internasional<sup>11</sup>.

#### 4. Pengakuan luar negeri

Unsur ini bukan syarat mutlak untuk berdirinya suatu negara sebagaimana telah dijelaskan pada catatan kaki halaman sebelumnya. Sebagai contoh Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, padahal waktu itu belum ada satupun negara yang mengakui, sedangkan pengakuan dari Belanda pun baru diumumkan pada tahun 1949<sup>12</sup>.

### C. Visi dan Misi Negara

Visi dan Misi suatu negara dapat berbeda berdasarkan filosofi, situasi, kondisi, dan sejarah dari masing-masing negara yang sudah terbentuk. Secara garis besar misi suatu negara ada tiga<sup>13</sup>.

#### 1. Mencapai kekuasaan politik

Negara identik dengan penguasa, karena itu tujuan negara adalah membangun kekuasaan secara efektif. Setiap penguasa akan berusaha mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.

#### 2. Mencapai kemakmuran material

Kemakmuran atau kesejahteraan material menjadi tujuan inheren dalam bangunan negara karena negara adalah organisasi masyarakat yang berupaya

---

<sup>11</sup> Moh Kusnardi dan Bintan R.Saragih, *op.cit.*, h. 105.

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *op.cit.*, h. 34.

<sup>13</sup> Hendra Nurtjahjo, *op.cit.*, h. 25-26.

menggalang pemenuhan kebutuhannya secara terstruktur melalui pemerintahan yang ada.

### 3. Mencapai kebahagiaan akhirat

Maksud mencapai kebahagiaan akhirat adalah negara bertujuan memfasilitasi rakyatnya untuk leluasa melakukan amal saleh guna mempersiapkan hidup sesudah mati. Negara juga harus mengarahkan warganya unruk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa disamping berilmu dan berteknologi.

## **D. Tugas-Tugas Negara**

Negara adalah tuntunan operasional satu-satunya yang secara syariah dijadikan Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh. Bahkan dapat dikatakan bahwa Islam tidak akan tampak hidup jika tidak ada sebuah negara yang menerapkannya dalam setiap aspek.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn berpendapat tugas-tugas negara yang harus dijalankan oleh pemerintahan adalah menciptakan kondisi tenteramnya beribadah kepada Allah, mengalokasikan sumber daya alam secara adil, menegakkan keadilan, mengatur kehidupan ekonomi dan sosial, menetapkan harga apabila diperlukan, melarang monopoli dan penimbunan, pengaturan ketenagakerjaan, dan pengaturan kepemilikan individu<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), Cet.ke-1, h.18-24.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tugas negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari. Adalah tugas negara membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar, dan menegur orang yang lalai<sup>15</sup>.

Secara umum tugas negara menurut al-Baqillani yang dikutip oleh J.Suyuthi Pulungan adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, menghilangkan penindasan, dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat<sup>16</sup>. Kemudian Charles E.Merrian dalam kutipan yang sama menjelaskan untuk mencapai tujuan negara, pemerintah mempunyai lima fungsi yaitu, menjaga keamanan eksteren, menumbuhkan ketertiban intern, menjaga kesejahteraan umum, memberikan kebebasan dan keadilan<sup>17</sup>.

Senada juga dengan pendapat Abul 'A'la al-Maududi untuk mencapai tujuan suatu negara yaitu terciptanya kehidupan yang layak maka negara ditugaskan untuk menegakkan perdamaian, melindungi batas-batas wilayah negara, dan meningkatkan taraf hidup orang awam. Namun beliau berpendapat bukanlah semua itu tujuan akhir suatu negara, melainkan tujuan utama suatu negara adalah untuk terlaksananya hukum syariat-syariat yang digariskan oleh Islam dan mencegah segala bentuk kejahatan dan kemunkaran<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 252.

<sup>16</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), Cet.ke-1, h. 76.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>18</sup> Abul 'A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), Cet.ke-1, h. 206-207.

Sementara kejahatan dan kemungkaran tidak dapat terlaksana kecuali dengan adanya pemimpin. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad ‘Abid al-Jabiri sebagai berikut:

“Karena itu satu-satunya yang diberikan oleh rujukan tradisi kepada kita adalah bahwa di dalam al-Qur’an terdapat hukum-hukum yang membutuhkan pemegang perintah untuk menjalankannya atas nama umat Islam. Konsep pemegang perintah (*waliyyul amri*) dalam Islam merupakan konsep yang luas mencakup kepala keluarga, kepala suku, ahli fiqh dan penguasa muslim di negara muslim baik sebagai wali, amir atau khalifah”<sup>19</sup>.

Kemudian Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa membentuk imarah (kepemimpinan) adalah hal yang wajib dilaksanakan. Beliau beralasan bahwa *iqomatuddin* tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya pemimpin. Sebagaimana perkataannya: Seluruh anak Adam mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seorang pemimpin untuk mengendalikan<sup>20</sup>.

Dari ungkapan di atas jelas kepada kita bahwa negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Agama tidak akan tegak kecuali dengan negara dan negara tidak akan aman kecuali dengan agama.

Sedangkan al-Mawardi memberikan tugas-tugas yang lebih detail kepada negara (kepala negara) diantaranya, menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahan yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam, menjalankan hukum bagi pihak yang bertikai dengan adil, menjaga keamanan masyarakat, menjaga perbatasan negara dengan perangkat

---

<sup>19</sup> Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari’ah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), Cet.ke-1, h. 63.

<sup>20</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah As-Syar’iyah*, *op.cit.*, h. 156.

yang memadai, berjihad melawan pihak yang menentang Islam, menarik fay' dan zakat sesuai dengan syariat, menentukan gaji bagi rakyat, mengangkat pejabat pembantu, dan seorang kepala negara langsung melakukan inspeksi terhadap kinerja pejabatnya<sup>21</sup>.

Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisifatif dari serangan luar. Tetapi tanggung jawab pemerintah harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur, dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka yang menyangkut masalah perekonomian<sup>22</sup>.

Dari paparan beberapa pendapat ilmuan di atas maka dapat disimpulkan tugas negara secara umum adalah: menegakkan hukum secara adil (peradilan), menjaga keamanan rakyat dan negara (pertahanan), dan memberikan kehidupan yang layak bagi rakyat (perekonomian). Karena penelitian ini terfokus pada distribusi kekayaan, sementara distribusi kekayaan termasuk dalam kajian ekonomi, maka di bawah ini akan dijelaskan secara umum tugas negara dalam perekonomian.

Tugas negara dalam perekonomian Menurut pendapat M.Faruq an-Nabahan adalah<sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup> Abil Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatul al-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006), Cet.ke-4, h. 18.

<sup>22</sup> M.Faruq an-Nabahan, *op.cit.*, h. 54

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 55-59.

## 1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian

Yang dimaksud penggerak perekonomian contohnya adalah pemerintah (negara) harus mengawasi praktik produksi dan jual beli. Dikatakan disini praktik produksi sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, sebab berawal dari sinilah masyarakat akan mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh produsen. Maka pemerintah harus mengontrol apakah produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan al-Qur'an dan Hadis serta Undang-Undang yang berlaku.

## 2. Menghentikan muamalah yang diharamkan

Secara umum pemerintah harus memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang yang halal lagi baik, dan harus tegas melarang barang-barang yang haram beredar di pasar<sup>24</sup>. Di samping itu juga pemerintah harus tegas melarang segala transaksi yang dilarang oleh al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Seperti riba, penimbunan, penjualan barang-barang haram dan sebagainya. Bahkan M.Faruq an-Nabahan berpendapat segala bentuk muamalah yang paling diharamkan adalah riba dan *ihthikar* (penimbunan). Sehingga beliau mengemukakan tidak ada batasan jenis barang yang haram ditimbun<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008), Cet.ke-1, h. 461.

<sup>25</sup> M.Faruq an-Nabahan, *op.cit.*, h. 58.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah apabila seseorang menimbun barang kebutuhan manusia maka pemerintah harus memaksa *muhtakir* (yang menimbun) untuk menjualnya sesuai dengan harga pasar<sup>26</sup>.

### 3. Menentukan harga apabila dibutuhkan

Ketentuan dalam menetapkan harga adalah jangan ada terjadi kezaliman, baik bagi penjual maupun pembeli. Kalau terjadi kezaliman maka penetapan harga tidak boleh dilakukan. Namun sebaliknya diharuskan bagi pemerintah menentukan harga apabila dapat menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama<sup>27</sup>.

Menurut Muhammad Baqr Ash-Shadr salah satu ekonom muslim, menyatakan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab yaitu berkenaan dengan memberikan kepada individu kesempatan yang luas untuk bekerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila hal itu tidak tercapai maka pemerintah berkewajiban menyediakan jaminan sosial kepada masyarakat<sup>28</sup>.

Sedangkan dalam buku Ekonomi Islam karangan P3EI, tugas pemerintah dalam perekonomian secara umum adalah: manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah lainnya, menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat

---

<sup>26</sup> Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, h. 26. Lih.juga Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 139.

<sup>27</sup> M.Faruq An-Nabahan, *op.cit.*, h. 60.

<sup>28</sup> Muhammad Baqir as-Shadr, *Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008 ) , Cet.ke-1, h. 455.



kekayaan dan kesejahteraan, menjaga keseimbangan ekonomi khususnya dalam distribusi kekayaan, dan melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> P3EI, *op.cit.*, h. 460.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum

Distribusi dalam bahasa Arab diartikan dengan *dulat* yang berarti berputar, beredar, dan bergilir. Dengan demikian secara terminologi *dulat* adalah sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan<sup>1</sup>.

Distribusi menurut KBBI ada dua definisi, *pertama*, penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, *yang kedua* yaitu pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya<sup>2</sup>.

Sedangkan menurut Afzalurrahman distribusi kekayaan adalah suatu cara dimana kekayaan negara didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara, dan menyangkut juga prinsip yang menentukan bagian dari faktor-faktor tersebut<sup>3</sup>.

Christoper Pass mendefinisikan distribusi dengan proses penyimpanan dan pengiriman produk pada konsumen, biasanya dilakukan melalui perantara seperti grosir dan pengecer<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemertaan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), Cet.ke-1, h. 48.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, h. 360.

<sup>3</sup> Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 285.

<sup>4</sup> Christoper Pass. at. al, *Collins Dictionary of Business*, *terj. Kamus Lengkap Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), Cet.ke-1, h. 172.

Kemudian Sudarsono berpendapat bahwa distribusi adalah pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal, serta yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja dan pengusaha<sup>5</sup>.

Ahmad Ifham Sholihin memberikan definisi distribusi kekayaan dengan pemberian negara secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan yang diambil dari harta negara<sup>6</sup>.

Dasar hukum distribusi kekayaan:

1. Surat al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), Cet.ke-1, h. 93. Definisi ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa distribusi hasil produksi berkaitan dengan empat hal yaitu, upah atau gaji untuk para pekerja, keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjamkan, sewa tanah, laba yang diperoleh dari proyek. Namun beliau menentang hal yang kedua, sebab beliau berpendapat bahwa keuntungan semacam itu tergolong kepada riba, sedangkan riba diharamkan dalam Islam. Lih.dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsani Press, 1997), Cet.ke-4, h. 201.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), Cet.ke-1,h.249.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 546.

Dari ayat diatas walaupun sebenarnya secara ekpelisit hanya berkenaan dengan hukum fai dan pembagiannya tetapi sesungguhnya ayat diatas memberi penataan sistem sosial ekonomi yang Islami. Supaya keseimbangan dan keharmonisan di dalam masyarkat, maka Islam menganjurkan supaya harta itu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kandungan ayat ini menjadi bukti kongkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Pengaturan mengenai harta *fay'* jelas menunjukkan bahwa Islam juga tidak hanya berkutat dalam urusan privat dan mengabaikan urusan publik, sebagaimana yang dituduhkan kaum Liberal.

## 2. Surat At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>8</sup>.

Dari ayat di atas jelas kepada kita adanya perpindah kekayaan dari orang kaya kepada orang-orang tertentu yang pada akhirnya kekayaan itu akan beredar kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga taraf hidup orang-orang yang berkekurangan dapat meningkat.

<sup>8</sup> Ibid., h. 196.

Sayyid Quthb menjelaskan zakat ditempatkan pada posisinya menurut syariat Allah dan menurut aturan Islam, bukan sebagai perbuatan sukarela dari orang yang berkewajiban menunaikannya. Ia adalah suatu kewajiban yang pasti, bukan hadiah dan pemberian tanpa ukuran dari distributor. Ia adalah salah satu kefardhuan dalam Islam yang dihimpun oleh pemerintah Islam dengan cara tertentu untuk memberikan pelayanan sosial tertentu<sup>9</sup>.

### **B. Kriteria yang Mendukung Terwujudnya Distribusi Kekayaan**

Untuk terwujudnya distribusi kekayaan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Pertukaran. Kriteria ini lebih mengacu pada konsep di mana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk didistribusikan kepada orang lain. Sehingga implikasi yang mengemukakan kemudian ialah adanya pondasi yang solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil.
2. Kebutuhan. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini lebih pada nilai keadilan di mana pendistribusian tersebut haruslah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing individu.
3. Kekuasaan atau Negara, dengan lebih merujuk pada prinsip ini, bagaimana peran kekuasaan atau negara turut mewarnai pendistribusian kekayaan negara secara lebih merata.
4. Norma-norma yang berkaitan dengan nilai sosial atau sistem yang sesuai dengan etika. Ketiga kriteria yang telah dipaparkan hendaknya lebih mengarah

---

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an, terj.* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), Cet.ke-1, jilid 10, h. 286.

pada norma-norma sosial atau mengarah pula pada nilai etika yang berkembang di masyarakat.

### **C. Sendi Kebebasan dan Keadilan dalam Distribusi Kekayaan**

#### **a. Sendi Kebebasan**

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa untuk tercapainya distribusi kekayaan yang adil hal yang pertama harus ditegakkan adalah kebebasan. Kebebasan dalam arti setiap orang berhak dalam kepemilikan khusus, sebab Islam mengakui hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara naluri manusia yang senang memiliki. Ini adalah naluri yang diciptakan Allah pada makhluknya tanpa ada campur tangan dari manusia sedikitpun<sup>10</sup>.

Hal ini beliau contohkan dengan perkataanya:

Ketika manusia memiliki sesuatu, dengannya ia merasakan bahwa dirinya memiliki harga diri, kekuasaan, dan kemampuan. Jika ia melihat orang lain memiliki segala sesuatu sedangkan dia tidak, maka harga dirinya akan hilang, berganti dengan perasaan rendah diri dan tidak berdaya dihadapan mereka yang memiliki<sup>11</sup>.

Kebebasan yang dimaksud disini menurut pendapat Zamir Iqbal adalah setiap individu tidak boleh dihalangi oleh orang lain untuk mendapatkan akses, baik terhadap teknologi, pendidikan dan sumber daya alam, sebab seseorang akan mendapatkan kesuksesan sesuai dengan kreatifitas dan bakat yang dia miliki<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 209.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.ke-2, h. 58-59. Hal serupa juga dikemukakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi, bahwa dalam perspektif Islam semua kekayaan yang ada adalah milik Allah. Lih. dalam bukunya yang berjudul *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, terj. *Etika dan Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1985), Cet.ke-1, h. 101.

Sehingga perolehan rezeki setiap orang akan berbeda-beda inilah salah satu tanda dari sendi kebebasan dalam ekonomi<sup>13</sup>.

Zamir Iqbal beralasan bahwa seluruh sumber daya alam pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka kebebasan dan peluang untuk menggunakan sumber daya ini harus didistribusikan secara merata kepada semua orang<sup>14</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسْتَوٰۤاۤ بِمَا عَمِلُوْۤا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْۤا بِالْحُسْنٰی ﴿٣١﴾

Artinya: “dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”<sup>15</sup>.

Tetapi kebebasan yang dimaksud di atas tidak terlepas dari peranan penting negara dalam mengatur keseimbangan di dalam masyarakat<sup>16</sup>. Sedangkan keseimbangan di masyarakat tidak akan tercapai kalau kekayaan hanya dimiliki orang-orang kaya saja, umpamanya masih diberlakukannya sistem bunga dalam mengembangkan kekayaan pribadi<sup>17</sup>. Sehingga prinsip kebebasan dalam Islam

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 211.

<sup>14</sup> Zamir Iqbal, *loc.cit.*

<sup>15</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 527. Lih.juga surat 2: 120 dan 284, 5: 18.

<sup>16</sup> Zamir Iqbal, *op.cit.*, h. 102.

<sup>17</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *op.cit.*, h. 101.

pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan individu, sebab untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur hak setiap individu harus dilindungi<sup>18</sup>.

Hal diatas bertentangan dengan sistem sosialis yang menghapuskan hak kepemilikan khusus yang berpendapat bahwa kebebasan individu adalah merupakan bahaya yang terus menerus mengancam kemaslahatan masyarakat, dengan demikian kebebasan hak pemilikan pribadi harus dihapuskan<sup>19</sup>. Dengan sendirinya seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip sama rasa dan sama rata dengan mengorbankan kebebasan individu. Tetapi apa yang mereka cita-citakan tidak tercapai sebab kerugian yang terbesar bagi manusia adalah kehilangan hak kebebasanya<sup>20</sup>.

Sangat bertentangan juga dengan sistem kapitalis yang tidak dibatasi dengan norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada batasan halal atau haram yang ada hanya bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya<sup>21</sup>.

Kedua sistem diatas berbeda dengan sistem Islam, walaupun pada dasarnya Islam membolehkan kebebasan tetapi Islam memberikan batasan-

---

<sup>18</sup> M.Faruq an-Nabahan, *op.cit.*, h. 41-42.

<sup>19</sup> Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 286

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 206.

<sup>21</sup> Mustafa Edwin Nasution. at.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet.ke-2, h. 27.



batasan yang boleh dimiliki oleh individu. Islam tidak mengakui segala kepemilikan yang didapat dari cara yang menyimpang<sup>22</sup>.

Islam tidak membolehkan hak milik individu yang tak terbatas tanpa ada aturan yang membatasinya. Bahkan Yusuf Qardhawi berpendapat kebebasan mutlak tanpa batas termasuk ke dalam akhlak yang terkutuk<sup>23</sup>. Dalam hal ini aturan yang membatasinya mengacu kepada syariat yang ditetapkan Allah dan RasulNya<sup>24</sup>.

Sehingga pada perinsipnya kebebasan hak pemilikan individu dalam Islam dijamin secara syariat, tetapi dengan syarat tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak<sup>25</sup>.

Hak memiliki kekayaan menurut Najatullah Siddiqi dalam kutipan Mohamed Aslam Haneef bahwa dalam kepemilikan tidak boleh menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat akan bekerja demi tujuan bersama, yaitu menggunakan sumber daya yang diberikan Allah swt bagi kebaikan semua orang. Apabila terjadi konflik kepentingan maka kepentingan masyarakat atau kepentingan umum harus didahulukan mengingat komitmen Islam terhadap keadilan umum. Namun itu semua harus dilakukan tanpa melanggar keadilan terhadap individu dan di dalam batas-batas syariah<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> M.Faruq An-Nabahan. *op.cit.*, h. 39.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 220.

<sup>24</sup> Mustafa Edwin Nasution. *at.al, loc.cit.*

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 27. Lih.juga Syamsul Balda dalam bukunya *Menuju Sistem Ekonomi Qur'ani*, (Jakarta: Tarbiatuna, 2001), Cet.ke-1, h. 51.

<sup>26</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), Cet.ke-1, h. 51-52.

Hal serupa dikemukakan oleh As-Syatibi seperti yang dinukil oleh Karnaen A.Perwataatmadja dan Anis Byarwati bahwa hak milik individu pada dasarnya diakui. Namun ia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air. Dia menjelaskan air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimonopoli oleh siapapun<sup>27</sup>.

Dalam sistem ekonomi Islam prinsip yang berlaku bahwa faktor produksi (sumber-sumber umum) dan modal usaha tidak boleh dikuasai oleh seseorang, tetapi semua faktor produksi itu harus berada di tangan komunitas yang diwakili oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stagnasi pembangunan ekonomi apabila faktor-faktor produksi dikuasai oleh segelintir orang<sup>28</sup>.

Jaribah al-Haritsi berpendapat paling tidak ada dua ketentuan dalam kepemilikan yang disebutnya dengan manajemen kepemilikan, yaitu<sup>29</sup>:

1. Berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari sumber-sumber bumi (sumber umum).
2. Berkaitan dengan penentuan kaidah-kaidah dalam menggunakan kepemilikan khusus, dan tujuan dari penetapan kaidah-kaidah tersebut, yaitu kebenaran penggunaan setiap individu terhadap harta yang mereka miliki.

---

<sup>27</sup> Karnaen A.Perwataatmadja, *op.cit.*, h. 163.

<sup>28</sup> Zaki Fuad Chalil, *op.cit.*, h. 77.

<sup>29</sup> Jaribah al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab, (terj)*, (Jakarta: Khalifa, 2006), Cet.ke-1, h. 220.

Penjelasan sisi pertama dari dua sisi di atas (jumlah yang mungkin dimiliki seseorang) di dalam Fikih Ekonomi Umar dijelaskan bahwa kepemilikan tanah mati tidak diperbolehkan oleh Umar bin Khattab kecuali sebatas yang dapat mencukupi kebutuhan pokok seseorang dan dengan syarat bisa mengolah tanah tersebut. Tetapi Umar lebih menerapkan pengelolaan tanah larangan sebagai milik umum yang dikelola oleh negara demi kemaslahatan orang banyak<sup>30</sup>.

Begitu juga dengan barang tambang pada zaman sekarang Jaribah al-Haritsi berpendapat pengelolaannya diserahkan kepada negara sekaligus mendistribusikannya. Tetapi bukan berarti negara harus mengeskplorasinya sendiri, boleh saja negara mengadakan kontrak kerja dengan pihak tertentu, dengan catatan manajemennya dipegang oleh negara<sup>31</sup>.

Kemudian penjelasan sisi yang kedua adalah sebagai berikut; setelah seseorang mendapatkan batasan kekayaan, maka hal kedua yang harus diperhatikan adalah cara penggunaan harta tersebut. Konsep penggunaan harta dalam Islam harus dapat merealisasikan kemaslahatan bagi pemilik harta itu sendiri dan bagi orang lain<sup>32</sup>.

Di dalam menggunakan harta seseorang dituntut supaya tidak kikir dan juga tidak royal, tetapi membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Sebab kalau kikir dalam menggunakan harta bisa menghambat perputaran dan peredarannya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 222-228.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 235.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 221.

kepada orang lain. Sebaliknya kalau berlebihan dalam menggunakannya akan terjerumus ke dalam saluran-saluran yang salah, boros, dan tidak produktif<sup>33</sup>.

Seperti perkataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf sebagai berikut:

Dalam soal perbelanjaan haruslah diperhatikan beberapa syarat dalam pengeluarannya, yaitu pada jalan yang benar dan jauh dari keborosan dan kesesatan. Jalan benar yang demikian adalah sederhana dan hemat dalam segala perbelanjaan. Maka janganlah membeli hal-hal tidak perlu. Dengan perkataan lain, haruslah berdiri di tengah-tengah antara royal dan kikir, antara pemborosan dan penghematan<sup>34</sup>.

M.Quraisy Shihab menjelaskan dalam menginvestasikan harta yang harus diperhatikan adalah aspek kemaslahatan dan keadilan<sup>35</sup>.

#### **b. Sendi Keadilan**

Di atas sudah dijelaskan mengenai sendi kebebasan hal ini harus disempurnakan dengan sendi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan antarindividu dengan unsur materi dan spritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya. Keseimbangan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Abul 'A'la Al-Maududi, *op.cit.*, h. 216.

<sup>34</sup> Abdullah Zaki al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Cet.ke-1, h. 183.

<sup>35</sup> M.Quraisy Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet.ke-1, h. 199-200.

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 228.

Arti keadilan yang paling mendekati dalam pembahasan ini adalah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja, berusaha dan memperoleh sarana untuk itu<sup>37</sup>.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi merinci pengertian substantif keadilan yang mencakup; *pertama* perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan, *kedua* pemenuhan hak pekerja, *ketiga* kesetiakawanan sosial yang menyeluruh, dan yang *keempat* mendekatkan kesenjangan antarmanusia<sup>38</sup>. Keempat hal tersebut menurut beliau termasuk dalam keadilan ekonomi.

Rumusan pertama bahwa perbedaan dan pemerataan kesempatan merupakan substansi keadilan sosial dalam Islam menimbulkan pertanyaan karena disana perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan merupakan dua hal yang berlawanan. Pemberian kesempatan yang sama tentunya dimaksudkan untuk menghasilkan pemerataan pendapatan<sup>39</sup>. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan, seperti perkataanya di bawah ini:

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 229-244.

<sup>39</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009), Cet.ke-1, h. 132.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 228.

Sehingga menurut Qardhawi yang termasuk ke dalam makna keadilan adalah membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras mereka<sup>41</sup>.

Pada akhirnya perbedaan pendapatan itu dapat diterima. Hal serupa dikemukakan oleh Asyraf Muhammad Dawwabah bahwa perolehan rezeki setiap orang sesuai dengan bakat dan profesionalisme kerja masing-masing. Sehingga kehidupan ini bisa langgeng dan berkembang<sup>42</sup>. Sebab kalau semua orang sama dalam segala bidang maka kehidupan tidak akan berkembang. Sebagaimana perkataanya:

Jika seluruh manusia sama persis dalam segala hal maka tidak mungkin mereka menjalankan kehidupan ini seperti yang ada di muka bumi ini, dan tentu masih banyak pekerjaan yang belum bisa diselesaikan, karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya disebabkan tidak memiliki kemampuan. Maka Allah menciptakan manusia dengan bakat yang berbeda<sup>43</sup>.

M.Umar Chapra juga berpendapat bahwa perbedaan pendapatan diakui dalam Islam sepanjang penyebabnya dalam hal keterampilan, inisiatif, dan usaha<sup>44</sup>. Bahkan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 71 dijelaskan:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي  
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 229.

<sup>42</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), Cet.ke-1, h. 39. Lih . juga Abul 'A'la Al-Maududi, *op.cit.*, h. 217.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet.ke-1, h. 214. Lih.juga Syamsul Balda, *op.cit.*, h. 49-50, Syed Nawab Haider Naqvi, *op.cit.*, h. 128, dan Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat.(terj)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet.ke-1, h. 79.

Artinya: *"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah"*<sup>45</sup>.

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa perbedaan perolehan rezeki dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada kezaliman diantara masyarakat dalam mendapatkannya. Allah membedakan perolehan rezeki bagi umat manusia pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi banyaknya kekayaan merupakan ujian dari Allah, apakah manusia pandai bersyukur. Begitu juga sebaliknya kurangnya kekayaan merupakan ujian juga, apakah manusia bisa rela terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah tersebut.

Kemudian dalam surat al-Zukhruf ayat 32 dijelaskan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan<sup>46</sup>.

Ayat ini menjelaskan kepada kita dengan adanya perbedaan perolehan rezeki merupakan satu ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat manfaat bagi

<sup>45</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 274.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 491.

umat manusia. Dengan adanya perbedaan tersebut maka kehidupan di muka bumi ini berjalan dengan baik. Kalau sekiranya perbedaan itu tidak ada tentu masih banyak pekerjaan yang belum terselasaikan, sebab satu sama lain tidak saling membutuhkan lagi.

Sedangkan menurut Syed Nawab Haider Naqvi berpendapat mengenai konsep keadilan dalam Islam harus ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. *Pertama* pada hakikatnya seluruh harta yang dimiliki setiap individu adalah titipan Allah, Allahlah pemilik yang sebenarnya<sup>47</sup>. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah atas harta tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَانْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ  
ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”<sup>48</sup>.

Sehingga kepada seluruh kaum muslimin khususnya orang kaya berkewajiban untuk tidak menghambur-hamburkan hartanya, tetapi sebaliknya

---

<sup>47</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *op.cit.*, h. 128-131.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 538.



muslim yang kaya harus memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, karena hal ini dapat membantu untuk mewujudkan keadilan distribusi kekayaan<sup>49</sup>.

Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut maka negara dapat memaksanya untuk memenuhi hak-hak kaum miskin<sup>50</sup>. Bahkan Yusuf Qardhawi berpendapat negara boleh merampas harta orang kaya dan menjatuhkan hukuman kalau mereka menolak<sup>51</sup>. Sebab masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak disebut masyarakat Islam, seperti dinyatakan oleh nabi Muhammad saw sebagai berikut:

جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَ

Artinya: “Bukanlah seorang mu’min yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar”<sup>52</sup>.

Kedua, keadilan dalam Islam berakar pada keimanan manusia, sungguh keimanan kepada Allah akan menimbulkan adanya suatu kewajiban otomatis untuk berbuat adil. Sebab dengan keimanan, manusia merasa seluruh pekerjaan yang dilakukannya ada yang mengawasi yaitu Allah swt, dan pada akhirat nanti akan dihisab di hadapan sang pencipta.

M.Quraissy Syihab berpandangan bahwa keimanan sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Keterikatan dengan keimanan akan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya dengan mengindahkan perintah dan larangan Allah yang

---

<sup>49</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *loc.cit.*

<sup>50</sup> Syamsul Balda, *op.cit.*, h. 45.

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 254.

<sup>52</sup> Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrohim al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibnu al-Haisyam, 2004), Cet.ke-1, h.711

tercermin pada kegiatan halal dan haram. Selanjutnya beliau juga berpendapat dengan keimanan tersebut mendorong seseorang menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehingga terjalinlah hubungan harmonis di dalam masyarakat<sup>53</sup>.

M. Umer Chapra berpendapat keseimbangan ekonomi termasuk keadilan distribusi tidak akan tercapai kalau segala keputusan yang diambil tidak disertai dengan keimanan kepada Allah swt<sup>54</sup>.

Selanjutnya beliau berargumen bahwa dampak keimanan terhadap diri seseorang bisa menyeimbangkan antara dorongan materil dan spritual, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, serta bisa menumbuhkan sifat kepedulian dan kerjasama antara individu<sup>55</sup>.

*Ketiga*, konsep keadilan dalam Islam berlandaskan atas hal-hal yang bisa memaksimumkan kebahagiaan manusia. Dalam konsep Islam kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan pencapaian-pencapaian materi saja, tetapi kebahagiaan sejati bisa diukur dengan rasa rela dan syukur kepada sang pencipta<sup>56</sup>.

#### **D. Tujuan Distribusi Kekayaan**

Menurut pendapat Jaribah al-Haritsi tujuan distribusi dalam ekonomi Islam adalah<sup>57</sup>:

---

<sup>53</sup> M.Quraissy Syihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), Cet.ke-2, h. 10.

<sup>54</sup> M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, *op.cit.*, h. 8.

<sup>55</sup> M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarata: Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-2, h. 102-104.

<sup>56</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *loc.cit.*

<sup>57</sup> Jaribah al-Haritsi, *op.cit.*, h. 215-216.

1. Tujuan dakwah, yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Misalnya bagian zakat untuk muallaf mempunyai dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Artinya orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain.
2. Tujuan pendidikan, yang terpenting di dalamnya adalah pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, mengutamakan orang lain, mensucikan diri dari akhlak tercela, pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri, ini berdasarkan maksud dari surat at-Taubah ayat 103.
3. Tujuan sosial, yakni memenuhi kebutuhan yang kurang mampu, menciptakan solidaritas di masyarakat, menguatkan tali persaudaraan, cinta dan kasih sayang antara individu maupun kelompok, dan mengikis sebab-sebab kebencian yang pada akhirnya akan tercipta keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sebagai contoh apabila distribusi kekayaan tidak adil maka akan mengakibatkan adanya daerah miskin yang berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas dan akhirnya ketenteraman masyarakat akan terganggu.
4. Tujuan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan dan mensucikan harta. Mengembangkan berarti menginvestasikannya yang sekaligus harta itu tidak akan habis karena zakat, sedangkan mensucikannya adalah dengan mengeluarkan zakatnya.



## BAB IV

### KONTRIBUSI NEGARA TERHADAP KEADILAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM

#### A. Konsep Islam dalam Distribusi Kekayaan

Di dalam Islam ada tiga komponen keadilan dalam ekonomi yaitu, *pertama* kesamaan kebebasan dan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, *kedua* keadilan dalam bertransaksi dan yang *ketiga* keadilan dalam distribusi<sup>1</sup>.

Dalam penelitian ini kita akan membahas keadilan dalam distribusi. Sebelum menjelaskan konsep Islam dalam distribusi kekayaan kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang beberapa prinsip pokok kebijakan ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarman Karim di bawah ini<sup>2</sup>:

1. Allah swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
2. Manusia hanyalah khalifah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah swt, sehingga orang yang kurang mampu mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
4. Eksploitasi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan.

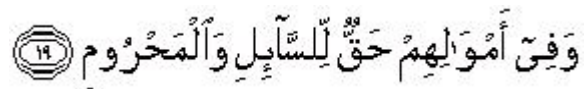
---

<sup>1</sup> Zamir Iqbal, *op.cit.*, h. 58.

<sup>2</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Cet.ke-1, h. 36.

5. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
6. Menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersifat wajib maupun sukarela.

Dari pendapat di atas jelas kepada kita bahwa seluruh aktifitas ekonomi termasuk dalam distribusi salah satu yang harus diketahui oleh setiap individu adalah seluruh kekayaan di muka bumi ini hanya milik Allah. Sehingga ketika manusia mendapatkan kekayaan dia harus mengetahui bahwa harta tersebut hanya titipan Allah dan di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Dari pemahaman ini maka akan muncul sifat saling tolong menolong yang akan membantu terciptanya keadilan distribusi kekayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Zariyat ayat 19:



Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*<sup>3</sup>.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bukanlah sifat dermawan apabila orang kaya memberikan hartanya kepada orang miskin, tetapi hal itu merupakan hak kaum miskin yang harus dikeluarkan. Artinya merupakan suatu kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang kurang mampu.

Senada juga dengan apa yang ditulis di dalam buku Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam bahwa hal pertama dalam distribusi kekayaan yang harus diketahui

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 521.

oleh setiap individu muslim adalah, harta yang dia peroleh di dalamnya ada hak Allah dan RasulNya serta muslim lain<sup>4</sup>.

Dengan demikian menurut penulis dengan adanya hak-hak orang miskin terhadap harta orang kaya, maka orang kaya tidak bisa lagi menimbun kekayaannya. Dengan sendirinya sirkulasi kekayaan akan meningkat yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sehingga distribusi dalam konsep Islam mempunyai dua metode, yaitu distribusi dengan metode ekonomi (*komersil*) dan distribusi berdasarkan aspek non ekonomi (*non komersil*)<sup>5</sup>.

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan.

Sedang mekanisme nonekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas nonproduktif. Misalnya dengan jalan pemberian hibah, shadaqah, zakat, wakaf, warisan dan lain-lain.

Menurut penulis mekanisme nonekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Baik yang

---

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h. 136.

<sup>5</sup> Zaki Fuad Chalil, *op.cit.*, h.393.

disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab nonalamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).

Mekanisme nonekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.

Afzalurrahman berpendapat prinsip distribusi kekayaan dalam Islam mengacu kepada al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu”*<sup>6</sup>.

Ayat ini memberikan prinsip dasar dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah Swt. dan dianugerahkan untuk manusia tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja. Mekanisme ini bisa diwujudkan jika ada institusi negara yang berwenang atasnya.

Afzalurrahman berpendapat bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar diantara orang-orang kaya saja, dan harus dibagi-bagikan seluruh kelompok masyarakat<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 546.

<sup>7</sup> Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 286.



Selanjutnya dia mengemukakan prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja<sup>8</sup>.

Dari paparan di atas penulis berpendapat ketika kekayaan sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat secara otomatis individu-individu dalam masyarakat akan berusaha dengan kemampuan dan bakat masing-masing yang pada gilirannya akan menghasilkan pendapatan. Ketika pendapatan setiap individu sudah ada maka sirkulasi kekayaan akan meningkat dan tidak hanya beredar di tangan orang-orang yang mempunyai modal saja.

Konsep pertama distribusi kekayaan dalam Islam dengan metode ekonomi (*komersil*), diantaranya adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

### **1. Distribusi melalui upah atau gaji bagi para pekerja**

Upah merupakan suatu bentuk pendistribusian harta dalam ajaran Islam yang direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan tertentu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar upah yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan (majikan) kepada pekerja.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>9</sup> Zaki Fuad Chalil, *op.cit.*, h. 393.

Di dalam Fiqh Ekonomi Umar disebutkan penentuan jumlah upah yang harus dibayarkan kepada para pekerja adalah sebagai berikut:

a. Upah (gaji) para pekerja pemerintahan

Gaji para pekerja pemerintahan ditentukan oleh pemerintah dengan ketentuan minimum tidak kurang dari kadar kecukupan. Jaribah al-Haritsi mengemukakan beberapa alasan dengan penentuan kadar tersebut. Diantaranya, *pertama* untuk mencegah para pegawai melakukan korupsi, *kedua* pada masa Umar beliau melarang para gubernurnya berdagang hal ini mengindikasikan untuk memberikan upah kadar kecukupan, *ketiga* seseorang yang bertugas mengurus kebutuhan kaum muslimin, seperti Umar memberikan gaji kepada Salamah bin Rabi'ah setiap bulannya lima ratus dirham, *keempat* upah tidak tunduk kepada sistem penawaran. Sebab mereka diberi tugas oleh Ulil Amri yang wajib ditaati<sup>10</sup>.

Qordhawi juga berpendapat pemerintah harus menjadi teladan bagi rakyatnya dalam memberi gaji pegawai dengan tingkat yang wajar, artinya memberikan kadar kecukupan kebutuhan individu<sup>11</sup>.

b. Upah para pekerja individu

Berbeda dengan batas minimum upah bagi para pekerja individu, Jaribah berpendapat tidak ada batasan minimum upah dalam masalah ini, beliau berpendapat besaran upah disini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang bercirikan komitmen dengan ajaran Islam. Selanjutnya Jaribah

---

<sup>10</sup> Jaribah Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 239-240

<sup>11</sup> Yusuf Qardahwi, *op.cit.*, h. 233.

mengemukakan upah pekerja individu tidak dipersyaratkan untuk merealisasikan kecukupannya. Dengan argumennya bahwa, *pertama* perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang lain. Maka persyaratan upah menyamai kecukupan itu berarti tidak adanya keistimewaan bagi orang yang memiliki kecakapan dan keahlian tinggi. *Kedua* persyaratan upah harus sampai pada batas kecukupan akan berdampak pada hal-hal yang negatif, diantaranya pekerja akan memilih pekerjaan yang mudah dilakukan yang pada akhirnya akan membunuh persaingan dan produktifitas<sup>12</sup>.

Qardhawi berpendapat para pekerja di perusahaan swasta tidak menjadi tanggung jawab majikan untuk memberikan upah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok para pekerja, jumlah upah pada perusahaan swasta disesuaikan dengan keahlian masing-masing pekerja. Tetapi walaupun demikian Qardhawi berpendapat perlu ditetapkannya undang-undang kerja yang mengatur kedua belah pihak<sup>13</sup>.

Sedangkan M.Faruq an-Nabahan berpendapat undang-undang kerja harus ditetapkan dengan tujuan melindungi hak-hak kaum pekerja, termasuk di dalamnya menentukan Upah Minimum Regional (UMR), jam maksimal kerja, dan lain-lain<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Jaribah, *op.cit.*, h. 242

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 233-235.

<sup>14</sup> M.Faruq an-Nabahan, *op.cit.*, h. 105-107.

Dalam masalah upah seorang majikan harus dengan segera membayarkan upah kepada pekerjanya setelah pekerjaan yang ditentukan sudah selesai dilaksanakan. Yusuf Qardhawi berpendapat haram hukumnya menunda pembayaran upah kepada pekerja sedangkan majikannya sanggup melunasinya pada saat itu<sup>15</sup>.

Dari beberapa pendapat ilmuan di atas penulis berpendapat penentuan upah baik dalam pemerintahan maupun di perusahaan swasta batas minimum upah harus dapat memenuhi kebutuhan pokok kaum pekerja. Sebab kalau dianalisa pendapat yang di atas seperti alasan yang dikemukakan oleh Jaribah kurang sesuai diterapkan pada zaman sekarang kalaulah majikan diberikan sepenuhnya wewenang untuk menentukan jumlah upah betapa banyak hak-hak buruh yang terampas artinya majikan akan bertindak sewenang-wenang kepada buruhnya tanpa memperdulikan kompensasi gaji yang sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh.

Selanjutnya menurut penulis upah harus ditinjau dan direvisi dari waktu ke waktu supaya tingkat kesejahteraan karyawan bisa ditingkatkan. Karena kebutuhan dari waktu ke waktu semakin meningkat, kalau tidak direvisi dan tidak memperhatikan masa bakti kerja serta profesionalisme seseorang maka hal ini termasuk ke dalam ketidakadilan<sup>16</sup>. Selanjutnya Undang-undang tentang ketenagakerjaan mutlak dibutuhkan supaya kedua belah pihak sama-sama

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h.. 232.

<sup>16</sup> M.Faruq an-Nabahan, *op.cit.*, h.109

mempunyai pegangan yang jelas apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah Islam untuk melindungi siapa yang terzolomi. Kemudian menurut hemat penulis upah minimum harus ditetapkan oleh pemerintah.

## **2. Distribusi yang didapat dari sewa tanah (bagi hasil tanaman)**

Menurut as-Shadr dalam Aslam Haneef sewa tanah hanya diperbolehkan jika pemilik tanah telah menanamkan tenaganya sejak awal, misalnya tenaga menghidupkan tanah mati. Sadr juga mempertahankan pandangan umum yang membolehkan transaksi *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqat*. Namun yang terlarang adalah membeli murah dan menjual mahal tanpa adanya kontribusi atau kerja bagi suatu produk, atau mengambil sewa tanah dan kemudian menyewakannya kepada orang lain lebih mahal<sup>17</sup>.

Sedangkan Siddiqi berpendapat yang dinukil oleh Aslam Haneef bahwa para pemilik tanah boleh menerima upah tetap ataupun tingkat kembalian (*rate of return*) yang bersifat variabel (yakni bagi hasil pertanian). Ia membedakan antara *return* dari sejumlah uang tertentu dan *return* variabel yang timbul karena tanah seseorang harus dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. Jika si pemilik lahan memilih yang kedua maka ia juga harus menyediakan benih, pupuk, dan sebagainya<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Aslam Haneef, *op.cit.*, h. 147.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 53.

Konsep kedua distribusi kekayaan dalam Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Zakat

Zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah swt yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin atau kelompok-kelompok lain yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan<sup>19</sup>.

Maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan<sup>20</sup>. Fungsi zakat menurut Mochtar Effendi ada tiga, *pertama* untuk menolong sesama, *kedua* untuk pemerataan agar harta tidak berkumpul pada beberapa orang saja, dan yang *ketiga* mensucikan harta itu sendiri<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. terj, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996), Cet.ke-1, h. 5.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, *op.cit.*, h. 81.

<sup>21</sup> Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam, 1996), Cet.ke-1, h. 23.

Sedangkan menurut Faruq An-Nabahan fungsi zakat secara umum beliau mencontohkan dengan pemberian zakat umpamanya kepada orang yang lumpuh sampai ia sembuh, atau memberikan kepada mereka yang membutuhkan fasilitas untuk menunjang penghasilan mereka sesuai dengan bidang yang dikuasainya<sup>22</sup>.

Menurut Chapra zakat merupakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung supaya hidupnya terlepas dari kesulitan dan kemiskinan<sup>23</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas penulis memahami inti dari pendistribusian zakat adalah supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja dan dengan sendirinya tarap hidup orang miskin dan yang kurang mampu bisa lebih baik dengan pemberdayaan zakat tersebut.

Hal ini dapat direalisasikan dengan cara memberikan zakat pada para mustahiq melalui tahapan-tahapan yang dapat menguatkan daya juang dan kemampuan untuk survive menjalani hidup. Tahapan-tahapan itu antara lain seperti melalui training pemberdayaan (*community development*), pemberian zakat sebagai modal usaha, juga pendampingan pada mustahiq ketika menjalankan bidang usahanya.

Tiga tahapan tersebut seyogianya diberikan secara simultan agar fungsi zakat untuk pemberdayaan ummat lebih mudah direalisasikan. Dengan demikian visi yang

---

<sup>22</sup> M.Faruq An-Nabahan, *op.cit.*, h. 113.

<sup>23</sup> M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, *op.cit.*, h. 274.

harus ditanamkan menurut penulis adalah bagaimana zakat ini bukan sekadar untuk kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek, tetapi lebih produktif dalam kerangka jangka panjang. Sekaligus pula memiliki visi hari ini dan tahun ini para mustahiq menjadi penerima zakat, tahun depan mereka berubah menjadi pemberi zakat.

Dengan zakat ini juga para mustahiq akan membeli barang-barang pokok sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang-barang pokok tersebut. Meningkatnya permintaan ini akan menarik peningkatan investasi. Meningkatnya investasi akan berdampak pada perluasan lapangan kerja yang dengan sendirinya akan merekrut tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran.

Penulis juga berpendapat zakat merupakan instrumen untuk meringankan tugas pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas salah satunya adalah berkurangnya kaum penganggur. Tetapi walaupun demikian kewajiban pemerintah tetap harus dijalankan untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan berarti dengan terrealisasinya fungsi zakat tadi menghilangkan tanggung jawab pemerintah. Hanya saja zakat dapat membantu meringankan sebagian tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu terkait, sehingga dapat mengurangi tugas pemerintah.



## 2. Jizyah

Islam memandang bahwa jizyah merupakan pajak perseorangan. Orang-orang yang menjadi sasaran jizyah adalah orang-orang Ahli Kitab, Yahudi, Nasrani, baik dia Yahudi dan Nasrani Arab atau tidak<sup>24</sup>. Golongan non muslim tersebut disebut dzimmi.

Dengan adanya pembayaran jizyah tersebut mereka bukan hanya dapat dibiarkan tinggal di sebuah negara Islam bahkan mereka juga mendapat perlindungan dari negara. Semasa pemerintahan Umar bin Khattab orang-orang kafir zimmi yang bersama kaum muslim berjuang tidak dikenakan kewajiban membayar jizyah berdasarkan persetujuan orang-orang Kristen dari Banu Thaliig yang dibebaskan membayar pajak perlindungan<sup>25</sup>. Jizyah hanya dikenakan bagi laki-laki yang balig lagi berakal, jizyah tidak dipungut dari anak-anak, orang gila, dan perempuan<sup>26</sup>.

Kesejahteraan rakyatlah yang menjadi dasar bagi dikenakannya jizyah atas kalangan non muslim. Jizyah bukan pajak represif ataupun suatu bentuk hukuman, karena sesuai konsep jizyah dijelaskan di dalam al Quran surat at-Taubah ayat 29:

---

<sup>24</sup> Abdul Qodim Zallum, *al-Amwal fi Daulatil Khilafah*, (Beirut Lebanon: Darul Ummah, 2004), Cet.ke-3, h. 63.

<sup>25</sup> Irfan Muhammad Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pada Masa Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet.ke-2, h. 100.

<sup>26</sup> Abdul Qodim Zallum. *op.cit.*, h. 65.

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk<sup>27</sup>.

Penetapan adanya kewajiban jizyah bagi kelompok non muslim adalah bukan dilakukan berdasarkan keinginan untuk mendapatkan harta atau kekayaan semata. Akan tetapi lebih dari itu, di dalam penetapannya terkandung makna-makna yang pada dasarnya juga bermanfaat bagi mereka yang diwajibkan membayar<sup>28</sup>.

Adalah pandangan yang salah jika mengatakan keberadaan jizyah ini dianggap sebagai biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk tinggal di wilayah Islam. Seandainya hal itu benar, maka kelompok wanita, anak-anak, orang yang sakit ingatan dan orang-orang yang sudah tua juga akan dikenakan pajak tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kesejahteraan rakyatlah yang menjadi pertimbangan penetapannya.

<sup>27</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 191.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 104.

Demikian juga dengan kecaman yang mengatakan bahwa jizyah adalah suatu bentuk hukuman atas perbedaan keyakinan mereka adalah hal yang keliru. Karena dalam Islam, bentuk pemaksaan atau penggunaan kekerasan untuk mengubah keyakinan beragama seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan dilarang dalam Islam. Bahkan sebaliknya dalam hikmah penetapan jizyah ini, mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya dan tidak ada paksaan untuk meninggalkannya.

### 3. Kharaj

Imam al Mawardi dalam *al Ahkam al Sulthaniyah* mendefenisika kharaj dengan “jumlah harta tertentu yang diambil dari luas tanah tertentu”<sup>29</sup>. Kharaj dapat dipandang sebagai bayaran yang wajib diambil dari kalangan kafir ketika tanah yang dijadikan objek kharaj tersebut didapat dari jalan peperangan dengan kaum muslimin dan jatuh ke tangan kaum muslimin maka kaum kafir masih memiliki pilihan untuk tetap memiliki dan mengelola tanah tersebut namun pajak yang diambil dari tanah itu maka disanalah kharaj dipungut. Apabila tanah tersebut dibiarkan kaum muslimin yang mengelolanya maka bayaran yang ditetapkan atasnya hanya dipandang sebagai sewa .

Pada pemerintahan Umar bin Khttab selain Jizyah ada lagi namanya Kharaj yaitu pajak hasil bumi. Pajak hasil bumi diterapkan oleh Umar terhadap tanah orang-orang non Islam sekali dalam setahun. Pajak hasil bumi tidak dapat

---

<sup>29</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *op.cit.*, h.295.

dipungut jika tanaman yang ditanam tersebut terserang hama, tanah longsor, kebakaran, cuaca yang sangat dingin dan sebagainya<sup>30</sup>.

#### 4. Warisan.

Menurut Qardhawi ada tiga hikmah disyariatkannya warisan. *Pertama* dapat menjamin kemaslahatan pribadi, *kedua* menjamin kemaslahatan keluarga, dan yang *ketiga* menjamin kemaslahtan masyarakat dalam harta warisan<sup>31</sup>. Sehingga tujuan utama warisan ini agar aset yang dimiliki dan kekuatan ekonomi tidak terpusatkan pada seseorang betapapun kayanya dia<sup>32</sup>.

Menurut Chapra tujuan dalam warisan yang ditetapkan Islam, yaitu untuk menciptakan distribusi kekayaan si mayit secara lebih luas. Jika nilai-nilai Islam itu diberlakukan dan sistem warisan secara efektif diterapkan, maka distribusi kekayaan dalam sebuah masyarakat muslim pasti akan merata dan akan terus menerus berlanjut<sup>33</sup>.

#### 5. Wakaf

Wakaf adalah cara pemindahan pemasukan pendapatan yang hakiki yang lahir dari pokok yang produktif dari pemiliknya kepada pihak atau individu yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 214-216.

<sup>32</sup> Zaki Fuad Chalil, *op.cit.*, h. 394.

<sup>33</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, *op.cit.*, h. 277.

lain, dan dapat diambil kemanfaatannya secara terus menerus selama pokoknya yang produktif masih ada<sup>34</sup>.

Wakaf bentuknya bervariasi dan tidak dibatasi oleh status sosial seseorang, kaya dan miskin, atau karena pertalian darah dan kekerabatan. Wakaf merupakan bentuk distribusi pendapatan yang sangat luas jangkauannya bagi umat, adakalanya dalam bentuk fasilitas umum seperti masjid, gedung balai pertemuan, perpustakaan, tanah pekuburan umum, dan lain-lain<sup>35</sup>.

Harta wakaf dapat diberdayakan untuk menunjang ekonomi umat, contohnya tanah yang diwakafkan seseorang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian misalnya yang tentunya akan menambah pendapatan bagi masyarakat.

## **B. Campur Tangan Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan**

Sebelum kita membahas campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan di bawah ini dijelaskan secara ringkas campur tangan negara dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan hal-hal berikut<sup>36</sup>:

1. Memastikan semua orang memiliki kesetaraan akses kepada sumber daya alam dan jalan mencari nafkah.
2. Memastikan setiap individu memiliki kesetaraan peluang untuk mendapatkan pendidikan, dan teknologi, serta peluang untuk memanfaatkan sumber daya ini.

---

<sup>34</sup> Jaribah, *op.cit.*, h. 311.

<sup>35</sup> Zaki Fuad Chalil, *op.cit.*, h. 394.

<sup>36</sup> Zamir Iqbal, *op.cit.*, h. 66.

3. Memastikan pasar diawasi dengan baik sehingga keadilan dalam pertukaran dapat dicapai.
4. Memastikan transfer kekayaan dari mereka yang lebih mampu kepada yang kurang mampu sesuai dengan aturan syariah.
5. Memastikan keadilan distribusi berlangsung pada generasi selanjutnya melalui implementasi aturan warisan.

Kemudian Umar Chapra memberikan beberapa kebijakan yang perlu diambil dalam kerangka stabilitas dan keadilan, diantaranya<sup>37</sup>:

1. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia

Individu mempunyai peran signifikan dalam pembangunan ekonomi. Individu perlu didorong untuk mau memberikan apa saja yang terbaik dengan bekerja keras dan efisiensi disertai dengan integritas, kejujuran dan disiplin. Upaya kearah itu adalah dengan memberikan kenyamanan dengan jaminan atas kepentingan mereka. Paradigma kapitalisme melihat bahwa kepentingan individu selalu selaras dengan kepentingan sosial, padahal tidak benar. Sosialisme mereduksi kepentingan individu dan mengharap agar individu bekerja efisien untuk negara.

2. Mereduksi konsentrasi kekayaan

Upaya menuju distribusi kekayaan ialah dengan melakukan perluasan kepemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan. Meliputi *pertama*

---

<sup>37</sup> M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, op,cit.*, h. 251-333.

reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan, *kedua* pengembangan industri mikro, *ketiga* kepemilikan lebih luas dan kontrol perusahaan, dan *keempat* mengaktifkan zakat dan sistem warisan Islam<sup>38</sup>.

### 3. Melakukan restrukturisasi ekonomi

Dalam konsumsi bagaimana menentukan prioritas untuk memenuhi kebutuhan. Istilah kebutuhan dapat digunakan untuk merujuk pada semua barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan mengurangi kesukaran. Dasar nilai terkait dalam Islam sudah dibahas dalam literatur fiqh berkisar pada kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan (*hajjiyat*), dan kelengkapan (*tahsiniyat*). Maka liberasi kebutuhan tidak dibolehkan untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada.

Liberalisasi hanya dibolehkan pada produksi, impor dan distribusi semua barang dan jasa. Kekuatan pasar dibiarkan memainkan peranan yang konstruktif sementara pemerintah melakukan apa saja untuk memberikan insentif dan fasilitas untuk menambah penawaran barang dan jasa. Pemakaian yang tak perlu harus dihilangkan. Gaya hidup pamer, korup, tamak harus dihilangkan<sup>39</sup>.

Pemerintah perlu melakukan prioritas dalam pengeluarannya. Terutama dalam pembangunan infrastruktur minimum yang diperlukan untuk pembangunan. Infrastruktur pedesaan dan jasa-jasa pertanian ditingkatkan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 262-275.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 283-285.

Pendidikan dan kesehatan diberdayakan secara merata ke setiap wilayah dan tidak terpusat di kota. Perumahan untuk orang miskin serta transportasi dibangun, agar akses ekonomi merata kepada setiap penduduk. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketegangan sosial karena perbedaan pendapatan.

Pemerintah juga berperan dalam upaya meningkatkan iklim investasi. Rakyat dianjurkan untuk menabung agar lapangan terbuka luas serta meningkatkan pembangunan. Penghalang iklim investasi seperti infrastruktur sosial dan fisik yang tidak memadai, sistem pajak yang tak adil, instabilitas politik harus direduksi sampai ambang batas minimal.

Peningkatan iklim investasi tersebut diarahkan untuk produksi kebutuhan pokok dan tidak diselewengkan untuk produksi barang mewah. Kontrol dilakukan ketika kondisi tidak stabil. Strategi tepat untuk kontrol ialah dengan mengubah preferensi individu dengan motivasi moral dan sosial. Produksi didasarkan pada kebutuhan agar tidak terjadi over produksi<sup>40</sup>.

Pendekatan baru bagi pengangguran adalah dengan ekspansi jumlah permintaan dan pembangunan industri-industri kota yang padat modal dengan skala besar dan menengah. Disisi lain pemerintah perlu mengembangkan perindustrian rakyat agar bisa membantu keluarga miskin dan mengurangi pengangguran<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> M.Faruq an-Nabahan, *op.cit.*, h. 115.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h, 313.



#### 4. Melakukan restrukturisasi keuangan

Keuangan adalah senjata ampuh di dunia modern. Ia berperan penting dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Restrukturisasi keuangan mencakup seluruh lembaga keuangan agar lembaga keuangan dapat memberikan sumbangan penuh terhadap penghapusan ketidak-seimbangan dan intermediasi yang adil dan efisien. Sumber keuangan harus digunakan untuk (a) membiayai sejumlah perusahaan terbaik, (b) produksi impor dan distribusi barang dan jasa<sup>42</sup>.

Distribusi modal diratakan kepada semua penduduk dengan melihat prestasi usaha yang dilakukan. Karena orang miskin menjadi miskin bukan karena tidak mau kerja keras atau kurang terampil. Masalahnya mereka tidak punya akses terhadap sumber-sumber keuangan untuk menjadi pengusaha dan ketrampilan mereka tidak digunakan secara optimal. Disinilah peran Pemerintah untuk melakukan distribusi modal yang adil.

#### 5. Melakukan kebijakan strategis

Kebijakan strategis kedepan dalam rangka mencapai tujuan *maqashid* ialah dengan melakukan perencanaan jangka panjang. Dimensi moral merupakan hal terpenting dalam pembangunan material.

Tanpa integrasi moral efisiensi dan pemerataan sulit terwujud. Dalam menyusun rencana kebijakan strategis maka perlu disusun prioritas-prioritas

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 325.

utama. Rencana ini juga perlu mengklasifikasi kebutuhan pada tiga kategori : kebutuhan, kemewahan dan kesenangan<sup>43</sup>.

Rencana ini harus menetapkan perubahan struktural yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meninggikan tingkat pertumbuhan. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi yang harus direformasi dan didirikan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mewujudkan kepemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber besar.

Kebijakan strategis demikian tidak akan terwujud tanpa landasan motivasi syariah sebagai sumber inspirasi dan memiliki komitmen terhadap kesejahteraan bagi semua rakyat dan bukan untuk kelompok tertentu.

Monzer Kahf menjelaskan bahwa pendekatan Islam terhadap distribusi kekayaan dimulai dari pengaturan hak milik kekayaan. Walaupun sebenarnya ekonomi Islam mengakui kekuatan pasar dalam distribusi kekayaan. Tetapi pada sisi yang lain sistem ekonomi Islam mengakui kekurangan kekuatan pasar dalam menciptakan keseimbangan dalam tatanan ekonomi. Maka berbeda dengan sistem Kapitalis yang meyakini bahwa kekuatan pasar merupakan alat untuk menyeimbangkan ekonomi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 338.

pemerintah. Sedangkan dalam ekonomi Islam peran pemerintah diperlukan pada saat-saat tertentu<sup>44</sup>.

Naqvi berpendapat semua anggota masyarakat berhak memperoleh tingkat pendapatan minimum terlepas dari tingkat kemampuan yang dimilikinya. Sehingga Naqvi berpendapat peran negara sangat penting dalam menjamin standar hidup minimum masyarakatnya<sup>45</sup>.

Sedangkan menurut Taleghani dalam Mohamed Aslam Haneef menjelaskan negara memiliki kekuasaan untuk membatasi atau mengurangi hak-hak individu dalam menggunakan dan memiliki sesuatu demi menegakkan keadilan dan kesamaan demi kepentingan bersama. Negara bertugas mengawasi kepentingan kaum miskin, yang berkekurangan dan yang tertindas dengan empat terapi sederhana. Yaitu, *pertama* distribusikan tanah yang tidak digunakan dan tidak digarap secara gratis kepada mereka yang mau menggarapnya, *kedua* batasi kepemilikan tanah dan beri petani hak untuk memiliki hasil panen mereka, bukan sekedar menjadi pekerja yang baik bagi pemilik tanah, *ketiga* jangan memberi dukungan kepada para tuan tanah yang memeras orang-orang miskin, dan yang *keempat* memungut pajak dalam bentuk zakat dan kharaj dari produk-produk tertentu dari para penggarap, dan

---

<sup>44</sup> [<sup>45</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, \*Islam, Economics, and Society\*, terj, \*Menggagas Ilmu Ekonomi Islam\*, \(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009\), Cet.ke-2, h. 94.](http://www. Monzer Kahf, Teori Distribusi Pendapatan Fungsional (makalah), diakses tgl 04 Mei 2011.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

membelanjakan pajak itu untuk membantu para petani dalam rangka menghidupkan tanah berikutnya<sup>46</sup>.

Dari pembahasan beberapa ilmuwan diatas menurut kemampuan analisa penulis untuk tercapainya keadilan distribusi kekayaan di suatu negara hal yang paling mendasar yang harus diatur adalah kepemilikan pribadi terhadap sumber-sumber daya alam. Sebab kalau kepemilikan terhadap sumber-sumber yang dimaksud bagi satu orang dengan orang lainnya sudah seimbang maka dengan sendirinya kesenjangan pendapatan antara individu dengan individu lainnya tidak terlalu jauh. Seperti yang dikemukakan oleh Jaribah bahwa kepemilikan di zaman Umar bin Khttab dibatasi dengan terpenuhinya kebutuhan pokok<sup>47</sup>. Kemudian walaupun kesenjangan itupun tetap ada disinilah hadir konsep Islam yang begitu menenteramkan dan membawa keadilan, yaitu salah satu contohnya adalah diawajibkannya zakat. Dalam hal ini tidak terlepas dari peran (kontribusi) negara untuk mengatur dan mendistribusikannya ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Dalam sejarah Islam terkenal dengan sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap orang yang tidak mau membayar zakat yaitu dengan memeranginya.

Kemudian penulis berpendapat kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan distribusi itu sendiri yaitu tercapainya pemertaan dan keadilan. Kita ambil contoh ketika

---

<sup>46</sup> Mohamed Aslam Haneef, *op.cit.*, h. 121-122.

<sup>47</sup> Jaribah al-Haritsi, *op.cit.*, h. 228.

seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dikarenakan kesehatannya terganggu, umurnya tua atau kemiskinan yang akut (sudah berusaha dengan maksimal tetapi kebutuhan tetap tidak terpenuhi) dan lain-lainnya. Maka sudah menjadi tanggung jawab seluruh orang muslim yang diwakili oleh penguasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana hadis nabi Muhammad yang berbunyi:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

Artinya: *“Bukanlah seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar”*<sup>48</sup>.

Walaupun sebenarnya pada satu sisi Islam mengajarkan supaya umatnya selalu berusaha untuk mendapatkan rezki dan tidak meminta-minta, tetapi disinilah berlaku ketentuan Allah ada yang miskin dan ada yang kaya maka disini negara harus berperan dalam menyalurkan harta orang-orang kaya kepada orang miskin. Dengan sistem yang sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

---

<sup>48</sup> Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrohim al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibnu al-Haisyam, 2004), cet.ke-1, h. 711.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan:

1. Konsep Islam dalam distribusi kekayaan ada dua macam yaitu:
  - a. Distribusi dengan metode ekonomi (*komersil*) diantaranya, pemberian upah bagi para buruh (pekerja), sewa tanah, dan distribusi dengan melakukan akad kerjasama usaha dan lain-lain.
  - b. Distribusi dengan metode non ekonomi (*non komersil*), diantaranya, zakat, warisan, wakaf, jizyah, kharaj dan lain-lain.
2. Kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan mutlak dibutuhkan sebab sistem pasar tidak selamanya bisa menjamin keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka negara harus berperan aktif dalam menjamin keadilan dan keseimbangan kekayaan terhadap rakyatnya. Kontribusi negara tersebut dapat dilakukan dengan membuat undang-undang yang mengikat tentang tidak bolehnya menimbun kekayaan supaya kekayaan itu beredar kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### **B. Saran**

Dari paparan dalam skripsi maka penulis memberikan beberapa saran kepada para pembaca:

1. Bagi golongan kaya disarankan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan terutama kerabat dekatnya. Karena hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan antara si kaya dan si miskin.

2. Bagi pemerintah diharapkan berperan aktif di dalam menjamin keadilan distribusi kekayaan kepada rakyatnya dan membela kaum yang berkekurangan dengan mengaktifkan lembaga-lembaga sosial, serta kembali kepada sistem ekonomi Islam untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichitar Baru van Hoeve, 2001). Cet.ke-2.
- Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995). Cet.ke-1.
- Abdullah Zaki Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). Cet.ke-1.
- Abdul Qodim Zallum, *al-Amwal fi Daulatil Khilafah* , (Beirut Lebanon: Darul Ummah, 2004), Cet.ke-3.
- Abil Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wal Wilayatul Al-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2006).Cet.ke-4
- Abul ‘A’la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. (Bandung: Penerbit Mizan, 1994). Cet.ke-1.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004). Cet.ke-1.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997). Cet.ke-1.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006). Cet.ke-1.
- Ahmad Ifham Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010). Cet.ke-1.
- Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2006). Cet.ke-1.
- C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 2007). Cet.ke-3.
- Christoper Pass. at. al, *Collins Dictionary of Business*, terj. *Kamus Lengkap Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994). Cet.ke-1.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, (Jakarta: PT.Syaamil Cipta Media, 2005). Cet.ke-2.

- Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Cet.ke-2.
- Didik J.Rachmini, *Ekonomi, Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004). Cet.ke-3.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). Cet.ke-1.
- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005). Cet.ke-1.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Alih Bahasa Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2007). Cet.ke-2.
- \_\_\_\_\_, *Siyasah as-Syar'iyah*, Alih Bahasa Rofiq Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). Cet.ke-2.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Cet.ke-2.
- Irfan Muhammad Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pada Masa Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet.ke-2.
- Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006). Cet.ke-1.
- J.Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996). Cet.ke-1.
- Karnaen A.Perwataadmadja, *Jejak Rekam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Cicero Publising, 2008). Cet.ke-1.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). Cet.ke-2.
- M.Solehuddin, *Asas – Asas Keuangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). Cet.ke-2.
- Moh Kusnardi dan Bintang R.Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005). Cet.ke-2.
- Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010). Cet.ke-1.

- Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang: Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam, 1996), Cet.ke-1.
- M.Faruq an- Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). Cet.ke-2.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). Cet.ke-1.
- \_\_\_\_\_, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, Terj. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Cet.ke-2.
- M.Quraisy Syihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008). Cet.ke-2.
- \_\_\_\_\_, M.Quraisy Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006). Cet.ke-1.
- Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001). Cet.ke-1.
- Muhammad Baqir As-Shadr, *Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008). Cet.ke-1.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010). Cet.ke-1.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). Cet.ke-1.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), Cet.ke-1.
- Syamsul Balda, *Menuju Sistem Ekonomi Qur'ani*,(Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2001). Cet.ke-1.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, terj. *Etika dan Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1985). Cet.ke-1.
- \_\_\_\_\_, Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terj. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Cet.ke-2.
- Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007). Cet.ke-1.

Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa M.Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti). Cet.ke-1.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Cet.ke-3.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Cet.ke-4.

\_\_\_\_\_, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). Cet.ke-1.

Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Cet.ke-2.

Zaki Fuad Khalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009). Cet.ke-1.